

Dari Ketidakadilan ke Kesadaran Politik: Sarekat Dagang Islam dan Transisi Menuju Sarekat Islam

Tengku Riza Fahlevi¹ Alya Putri Dania² Suci Larasati³ Rosmaida Sinaga⁴

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rijafahlevii@gmail.com¹ alyadniaaaa@gmail.com² ucayyy309@gmail.com³ rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Studi ini mengkaji Sarekat Islam sebagai arena kontestasi gagasan dalam fase awal kebangkitan nasional, serta kontribusinya dalam membentuk arah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam (SI) merupakan tonggak awal dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia yang muncul sebagai respons terhadap ketimpangan struktural akibat kolonialisme Belanda, diskriminasi rasial, dan marginalisasi ekonomi masyarakat bumiputra. Didirikan pertama kali sebagai Sarekat Dagang Islam (SDI) oleh Haji Samanhudi dengan tujuan membela hak-hak pedagang pribumi dari tekanan ekonomi dan politik pedagang Tionghoa yang dilindungi penguasa kolonial, organisasi ini kemudian berkembang menjadi kekuatan politik massal di bawah kepemimpinan visioner H.O.S. Tjokroaminoto. Sarekat Islam tidak hanya bertransformasi menjadi wadah perjuangan kelas bawah, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan kesadaran nasional melalui dakwah Islam, pendidikan politik, dan media pergerakan. SI menegaskan posisi Islam sebagai kekuatan moral dan sosial dalam menantang hegemoni kolonial. Namun, masuknya ideologi Marxis-Leninis yang dibawa oleh tokoh-tokoh seperti Semaun menimbulkan konflik ideologis yang tajam dan memperuncing perpecahan internal organisasi. Fragmentasi ini merefleksikan tarik-menarik ideologis dalam tubuh SI antara nasionalisme Islam dan komunisme yang sedang bertumbuh.

Kata Kunci: Sarekat Islam, Kolonialisme, Diskriminasi Rasial, Tjokroaminoto, Ideologi, Pergerakan Nasional

Abstract

The Sarekat Islam (SI) was a foundational organization in the history of Indonesia's national awakening, emerging in response to structural inequalities caused by Dutch colonialism, racial discrimination, and the economic marginalization of indigenous communities. Initially established as the Sarekat Dagang Islam (SDI) by Haji Samanhudi to protect native merchants from economic and political pressures imposed by Chinese traders backed by the colonial regime, the movement later evolved into a mass political force under the visionary leadership of H.O.S. Tjokroaminoto. Beyond its economic roots, SI became a vehicle for popular empowerment, fostering national consciousness through Islamic advocacy, political education, and activist journalism. It positioned Islam as a moral and social force against colonial domination. However, the infiltration of Marxist-Leninist ideology by figures such as Semaun sparked deep ideological rifts that culminated in internal fragmentation. This division highlighted the ideological tension within SI between Islamic nationalism and the rising tide of communism. This study examines Sarekat Islam as a contested ideological space in the early nationalist movement, and its enduring role in shaping Indonesia's path toward independence.

Keywords: Sarekat Islam, Colonialism, Racial Discrimination, Tjokroaminoto, Ideology, Nationalist Movement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era kolonial Belanda, dinamika gerakan Islam di Indonesia mengalami evolusi penting yang menandai pergeseran peranannya dari aktivitas spiritual semata menjadi

kekuatan sosial-politik yang cukup berpengaruh. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang melanda masyarakat pribumi, khususnya umat Islam, menjadi pemicu lahirnya berbagai organisasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan dan hak-hak kolektif. Salah satu organisasi awal yang muncul dalam konteks ini adalah Sarekat Dagang Islam (SDI), yang didirikan oleh seorang pengusaha batik bernama Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905. Tujuan awal SDI adalah untuk melindungi kepentingan para pedagang muslim lokal dari dominasi pedagang asing, terutama etnis Tionghoa, yang menguasai sektor perdagangan batik. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran kolektif, SDI mengalami perubahan orientasi yang signifikan. Masuknya H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912 menjadi titik balik yang penting, di mana SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI), yang mencerminkan semangat persatuan umat Islam dan komitmen terhadap perjuangan kebangsaan. Perubahan nama dan orientasi dari SDI ke SI menandai transisi penting dari fokus ekonomi sempit menuju peran yang lebih luas dalam memperjuangkan keadilan sosial dan politik. SI tampil sebagai wadah inklusif yang mampu merangkul umat Islam dari berbagai lapisan sosial untuk bersama-sama melawan ketidakadilan kolonial.

Organisasi ini tidak hanya aktif dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendirian koperasi, sekolah-sekolah rakyat, serta keikutsertaan dalam lembaga legislatif seperti Volksraad guna memperjuangkan aspirasi pribumi. Pada puncak kejayaannya sekitar tahun 1916, jumlah anggota SI diperkirakan mencapai 2,5 juta orang, menjadikannya salah satu organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Peranannya sangat vital dalam menumbuhkan benih-benih nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Meskipun kemudian dilanda perpecahan internal serta tekanan dari pemerintah kolonial, jejak perjuangan SI tetap menjadi warisan penting dalam sejarah kebangkitan nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri proses transformasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, dengan menyoroti pergeseran orientasi organisasi dari perjuangan ekonomi pedagang Muslim menuju peran yang lebih kompleks dalam ranah sosial-politik. Penulis akan mengkaji berbagai faktor internal seperti kepemimpinan dan dinamika ideologi, serta faktor eksternal seperti tekanan kolonial dan pengaruh modernisasi, yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan membahas bagaimana transformasi itu turut membentuk kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses modernisasi dan perjuangan melawan ketidakadilan kolonial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode yang mengandalkan penelaahan terhadap sumber-sumber literatur terdahulu guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri celah-celah penelitian yang belum banyak dibahas serta menghindari terjadinya duplikasi studi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan fokus pada kajian dokumen untuk menggali informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Kajian dokumen dimaknai sebagai suatu proses analisis terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dokumen digital dari internet, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan isu yang diteliti. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, peneliti melakukan identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik kajian. Kedua, data yang telah diperoleh dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana penulis menginterpretasikan isi dokumen sesuai dengan pemahaman konseptual dan

konteks historis yang melingkupinya. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemikiran yang lebih sistematis dalam menyusun argumen penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yaitu studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian dimana peneliti mempelajari penelitian-penelitian terdahulu untuk membantu menemukan ruang kosong penelitian dan menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama. Dalam hal ini penulis dalam memberikan jawaban sesuai dengan fokus penelitian yaitu dengan melalui metode kualitatif dengan kajian dokumen. Kajian dokumen dianggap sebagai analisis dokumen, yang terdiri buku, artikel, internet dan bahan-bahan yang sesuai dengan penelitian. Adapun cara-cara dalam pengumpulan datanya, Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang akan diteliti. Kedua, setelah data-data telah diperoleh oleh peneliti, maka selanjutnya menganalisis datanya melalui metode deskriptif sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini.

Perkecuan, Rasisme, dan Cikal Bakal Terbentuknya Sarekat Dagang Islam

Pada masa kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, praktik rasisme dan diskriminasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem sosial dan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Sejak diterapkannya *Regalings Reglement* (RR) pada tahun 1854, masyarakat Hindia Belanda diklasifikasikan secara hukum ke dalam tiga kategori rasial utama: golongan Eropa (khususnya Belanda), kelompok Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab, serta masyarakat pribumi. Klasifikasi ini melahirkan struktur hierarkis yang sangat ketat, yang secara sistematis memisahkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kesempatan ekonomi berdasarkan kategori ras. Model segregasi ini tidak hanya menghambat mobilitas sosial golongan bawah, tetapi juga dijadikan alat hegemonik untuk mempertahankan dominasi kolonial melalui eksploitasi perbedaan rasial. Dalam struktur masyarakat kolonial, orang Eropa menempati posisi teratas, menikmati hak istimewa dan mengendalikan sistem pemerintahan serta ekonomi. Kelompok Timur Asing, seperti etnis Tionghoa dan Arab, memainkan peran penting dalam sektor perdagangan namun tetap berada di bawah subordinasi hukum kolonial. Sementara itu, mayoritas pribumi dijadikan sebagai tenaga kerja murah yang tidak memiliki posisi tawar dalam sistem sosial, ekonomi, maupun politik. Etnis tionghoa selama ratusan tahun dijadikan sebagai mesin penghasil uang yang sangat efektif bagi Belanda. Situasi ini memicu munculnya perasaan antipati yang mendalam serta berkembangnya sentimen rasial di kalangan masyarakat pribumi terhadap kelompok tertentu, sebagai reaksi terhadap ketidakadilan struktural yang mereka alami dalam tatanan sosial-ekonomi kolonial (Setiono 2008, 293).

Sentimen rasial yang tumbuh di kalangan masyarakat pribumi terhadap komunitas Tionghoa di Surakarta tidak dapat dipisahkan dari rekayasa sistem kolonial yang dijalankan oleh pemerintah Belanda. Otoritas kolonial, melalui berbagai kebijakan ekonomi yang eksploitatif, memberikan hak-hak istimewa dan akses eksklusif kepada etnis Tionghoa dalam sektor perdagangan dan distribusi barang, sehingga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mencolok. Perlakuan preferensial ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memperdalam jurang pemisah antara kelompok etnis, yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk resistensi dari masyarakat pribumi. Salah satu manifestasi nyata dari ketegangan tersebut adalah pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888, sebagai ekspresi kolektif dari kekecewaan dan penolakan terhadap ketidakadilan struktural yang diciptakan oleh kolonialisme. (Poesponegoro dan Notosusanto 2008, 400–424). Ketegangan sosial yang dipicu oleh kebijakan kolonial turut melahirkan reaksi keras dari kalangan pribumi, salah satunya dalam bentuk tindakan kekerasan yang dikenal sebagai perkecuan. Pada awal abad ke-20, fenomena perkecuan marak terjadi di Surakarta sebagai manifestasi konflik sosial

antara kelompok pribumi dan etnis Tionghoa. Akar konflik ini tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan sosial yang mencolok akibat sistem yang menempatkan etnis Tionghoa dalam posisi ekonomi lebih unggul, hasil dari perlakuan istimewa pemerintah kolonial. Tindakan perkecuan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada malam hari, kerap kali disertai dengan kekerasan dan pembunuhan, merupakan bentuk ekstrem dari sentimen rasial yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.

Aksi perlawanan radikal dari masyarakat pribumi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi yang mereka alami tampak mencolok dalam maraknya fenomena perkecuan di Surakarta pada awal abad ke-20. Perkecuan, yang merupakan aksi kekerasan terorganisir oleh kelompok bersenjata yang melakukan perampokan di malam hari—sering kali disertai penyiksaan bahkan pembunuhan—bisa dipahami sebagai manifestasi dari konflik etnis yang telah mengakar antara masyarakat pribumi dan komunitas Tionghoa. Peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa ketegangan tidak sekadar bersifat ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi bentuk perlawanan sosial yang disulut oleh rasa ketidakadilan kolektif. Konflik horizontal ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kolonial Belanda yang dengan sengaja menciptakan ketimpangan melalui pemberian hak-hak ekonomi eksklusif kepada kelompok etnis Cina. Akibatnya, jurang sosial antara penduduk pribumi dan komunitas Tionghoa semakin melebar, menimbulkan kecemburuan sosial yang kemudian menjelma menjadi bentuk sentimen rasial ekstrem. Dalam kondisi tertindas dan terbatasnya akses untuk menyampaikan aspirasi secara legal, sebagian masyarakat pribumi menjadikan kekerasan sebagai saluran ekspresi kekecewaan mereka. Dalam konteks ini, tindakan menjadi “kecu”—sebutan bagi pelaku perkecuan—menjadi simbol dari perlawanan bawah sadar terhadap sistem kolonial yang timpang dan memihak. Oleh karena itu, perkecuan dapat dipahami sebagai wujud radikal dari sentimen rasial yang membara di tengah struktur kolonial yang menindas (Kapitalisme Bumi Putera 2008, 323–324).

Di tengah ketegangan etnis antara pribumi dan komunitas Tionghoa, serta meningkatnya insiden kekerasan seperti perkecuan, muncul sebuah respons konstruktif dari kalangan pedagang batik pribumi di kawasan Laweyan, Surakarta. Sebagai bentuk inisiatif perlindungan terhadap lingkungan mereka, sekelompok pedagang membentuk satuan keamanan swadaya yang dikenal dengan nama *Rekso Roemekso*. Kelompok ini lahir dari kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah mereka, yang pada waktu itu rawan gangguan akibat meningkatnya aksi kekerasan malam hari. Kehadiran *Rekso Roemekso* menjadi penyeimbang dalam suasana persaingan bisnis yang tajam antara pengusaha batik Tionghoa dan pribumi. Dengan berfokus pada kegiatan ronda malam, kelompok ini tidak hanya berperan dalam meredakan keresahan sosial akibat tindak kriminal, tetapi juga menunjukkan solidaritas sosial dan kekuatan komunitas lokal dalam merespons ketimpangan dan ancaman eksternal secara mandiri. Seiring berjalannya waktu, *Rekso Roemekso* berkembang tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai simbol kohesi sosial dan semangat kemandirian kaum pribumi dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi dari sistem kolonial yang diskriminatif. Kemudian, *Rekso Roemekso* mengalami transformasi arah dan fungsi, dari sekadar kelompok penjaga keamanan lingkungan menjadi sebuah organisasi dengan orientasi sosial dan ekonomi. Pada tahun 1905, organisasi ini secara resmi dikembangkan menjadi *Sarekat Dagang Islam* (SDI), yang bertujuan memperkuat posisi para pedagang Muslim pribumi dalam menghadapi dominasi dan praktik monopoli yang dilakukan oleh para pedagang Tionghoa. SDI menjadi wadah kolektif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di kalangan umat Islam untuk mempertahankan eksistensi ekonomi mereka di tengah ketimpangan pasar yang diciptakan oleh sistem kolonial.

Transformasi Sarekat Dagang Islam dan Konsolidasi Kepemimpinan HOS Tjokroaminoto

Keterlibatan H.O.S. Tjokroaminoto dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) berawal dari undangan yang disampaikan oleh para pengurus SDI cabang Surakarta. Undangan tersebut diterimanya dengan pertimbangan yang mendalam terhadap kondisi rakyat saat itu, yang belum mengenal konsep-konsep seperti kebangsaan, nasionalisme, atau bahkan makna tanah air. Dalam pandangannya, Islam sangat relevan untuk dijadikan sebagai basis perjuangan karena agama ini mampu membedakan kaum pribumi dari bangsa penjajah, sekaligus menjadi kekuatan pemersatu bagi umat dalam menghadapi segala bentuk penghinaan dan ketidakadilan yang menimpa rakyat bumiputra. Sebelum bergabung dengan SDI, Tjokroaminoto telah dikenal sebagai intelektual pribumi yang aktif menyuarakan pentingnya kemajuan sosial dan politik bagi bangsanya. Kehadirannya dalam tubuh SDI membawa pengaruh besar—di bawah kepemimpinannya, organisasi ini mulai mengalami pergeseran orientasi, dari semula bersifat ekonomi ke arah gerakan politik yang lebih terorganisir. Sejak tahun 1912, Sarekat Islam secara terbuka menampilkan dirinya sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat pribumi secara lebih luas (Karim, 1983: 19). Mengawali kiprahnya dalam Sarekat Dagang Islam (SDI), Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto menyusun kerangka dasar organisasi berupa anggaran dasar yang ditujukan untuk diberlakukan secara nasional. Demi merealisasikan cita-cita perjuangannya, ia menyusun tahapan strategis perjuangan yang terstruktur, yakni:

1. Menghapuskan kekuasaan kolonial dari bumi Indonesia dan merebut kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka.
2. Menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya sistem kehidupan dalam tatanan negara Islam yang telah meraih kemerdekaan.
3. Membangun tatanan pemerintahan berdasarkan hukum Islam, yang berperan sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifah fil ardh), serta memperjuangkan kemerdekaan umat manusia secara global. (Solahudin, 2011: 53–56).

Setelah merumuskan arah perjuangan tersebut, HOS Tjokroaminoto memutuskan untuk mengganti nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (SI). Penghilangan kata “Dagang” memiliki makna strategis: memperluas cakupan gerakan agar tidak terbatas pada sektor ekonomi dan aktivitas keagamaan saja, melainkan juga mencakup perjuangan di ranah politik, sosial, dan kebudayaan. Keanggotaan organisasi yang semula terbatas pada kalangan pedagang muslim kemudian dibuka untuk seluruh umat Islam dari berbagai lapisan sosial di tanah air. Selain itu, terjadi transformasi dalam kepemimpinan organisasi, dari tangan kaum borjuis pribumi ke tangan kaum intelektual muda yang terdidik dalam sistem pendidikan Barat. Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, SI mengalami pergeseran orientasi gerakan dari fokus ekonomi menuju perjuangan sosial-politik yang bersifat nasional dan menyeluruh. (Ma’arif, 1985: 79). Pada tahun-tahun selanjutnya, pertumbuhan Sarekat Islam mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada tahun 1915, terjadi restrukturisasi organisasi dengan pembentukan cabang-cabang SI Lokal di berbagai wilayah nusantara serta pendirian Centraal Sarekat Islam (CSI) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan organisasi.

Perubahan struktur ini awalnya merupakan inisiatif dari pemerintah kolonial yang berupaya memecah belah kekuatan Sarekat Islam guna melemahkan pengaruhnya (Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*, 62). Namun, strategi tersebut ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan karena jumlah anggota Sarekat Islam justru terus melonjak secara drastis. Dalam laporan Kongres Nasional pertama yang

digelar oleh CSI pada tahun 1916 di Bandung, tercatat kehadiran sebanyak 153.787 anggota yang mewakili 28 cabang SI Lokal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, menunjukkan betapa meluas dan kuatnya jaringan organisasi ini. (Sarekat Islam Congres 1916, 69). Menurut Korver, meningkatnya popularitas Sarekat Islam tidak bisa dilepaskan dari gerakan yang dibawanya yang sarat dengan semangat millenarisme, khususnya harapan akan munculnya sosok Ratu Adil. Gerakan ini bertujuan membawa keselamatan dan keadilan sosial, serta menyetarakan posisi hidup bagi rakyat pribumi, terutama kalangan bawah atau wong cilik, yang selama ini terpinggirkan dan menempati posisi paling rendah dalam hierarki sosial di bawah para priyayi, keturunan Indo-Eropa, bangsa Timur Asing, dan bangsa Eropa. Dalam cita-cita emansipasi yang diusung Sarekat Islam terkandung ide-ide penolakan terhadap perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang yang membedakan antara pribumi dan non-pribumi, penghormatan terhadap identitas kebangsaan sendiri, serta tuntutan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bidang politik. Selain itu, gerakan ini juga menolak sistem kapitalisme yang dianggap menindas dan memperkuat ketimpangan sosial.

Pada Maret 1916, perkembangan terjadi ketika (SI) akhirnya dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda dan diizinkan menjalankan sebagai partai politik dengan kantor pusat serta cabang di berbagai daerah. Sebelumnya, Gubernur Jenderal Idenburg sempat menolak pengajuan status hukum SI karena khawatir organisasi ini akan menjadi kekuatan politik yang berpengaruh. Namun, seiring waktu, pemerintah Hindia Belanda mulai bersikap lebih terbuka setelah melihat perkembangan SI. Pada tahun 1917, mereka bahkan mengirim HOS Tjokroaminoto untuk menjadi anggota parlemen (Volksraad). Salah satu anggota (SI) berhasil masuk ke Volksraad atas nama sendiri karena ketokohnya, bukan mewakili dari Central Serikat Islam (CSI). Namun, Tjokroaminoto tidak bertahan lama di parlemen karena menganggap Volksraad hanyalah alat politik yang diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Serikat Islam (SI) memiliki tujuan membantu anggotanya yang mengalami kesulitan finansial serta meningkatkan kehidupan beragama umat. Seiring waktu, terjadi perubahan aturan dalam konvensi di Surakarta, yang melarang pegawai pemerintah (ambtenar) menjadi anggota organisasi. Namun, pada Kongres di Bandung yang berlangsung pada 17-24 Juni 1926, SI justru mengeluarkan pernyataan politik yang menegaskan aspirasinya untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam negara yang berdaulat dan merdeka. Pada konvensi keempat tahun 1917, SI semakin menegaskan tuntutannya untuk memperoleh pemerintahan sendiri serta memaksa pembentukan Volksraad yang independen. Dalam upayanya, SI mengusulkan HOS Tjokroaminoto dan Abdul Muis sebagai calon anggota (Zuhroh Lathifah, dkk., 2020).

Nilai-Nilai Perjuangan dan Tujuan Gerakan Sarekat Islam

Dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan, Sarekat Islam (SI) mengusung berbagai nilai luhur yang menjadi landasan moral dan ideologis gerakannya. Nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan semangat perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan berdaulat.

1. Nilai pertama yang menjadi fondasi perjuangan SI adalah semangat nasionalisme dan kebangsaan. Nilai ini tercermin dari sikap yang menempatkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu, serta semangat mencintai tanah air yang mendorong rakyat untuk bersatu melawan penjajahan.
2. Nilai kedua adalah kepedulian sosial, yaitu rasa empati dan solidaritas terhadap sesama, terutama masyarakat kecil. Dalam konteks perjuangan SI, kepedulian ini diwujudkan melalui program-program organisasi yang bertujuan mengembangkan dunia usaha rakyat serta memperkuat kehidupan keagamaan umat Islam melalui jaringan kolektif dan bantuan sosial.

3. Ketiga, nilai religiusitas menjadi pilar utama dalam perjuangan SI. Ketaatan kepada ajaran Islam menjadi dasar dalam setiap langkah perjuangan. Nilai ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keimanan, menghormati perbedaan keyakinan, dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.
4. Nilai keempat adalah kedisiplinan yang diterapkan secara ketat dalam organisasi. Anggota SI diwajibkan mematuhi aturan, termasuk larangan untuk bergabung dalam organisasi lain, agar loyalitas dan fokus perjuangan tetap terjaga dalam satu barisan yang utuh.
5. Nilai kelima adalah semangat kerja keras. SI menanamkan etos kerja tinggi kepada seluruh anggotanya, karena hanya melalui usaha gigih dan konsistenlah cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan.
6. Keenam, semangat kolektivitas menjadi kekuatan utama. SI senantiasa menanamkan prinsip kebersamaan sebagai wujud dari persatuan, gotong royong, dan solidaritas dalam menghadapi tekanan dari rezim kolonial.
7. Nilai terakhir adalah kemandirian. SI mendorong rakyat Indonesia untuk mandiri secara ekonomi, politik, dan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap ketergantungan pada kekuasaan kolonial (Wahyu Istiyar Rini, 2024). Organisasi ini sejak awal berdiri memang dirancang sebagai sarana perjuangan politik yang mengusung kepentingan umat Islam pada masa itu. Sarekat Islam memiliki tujuan organisasi yang dibagi dalam dua skala waktu, yakni tujuan jangka pendek dan jangka panjang, masing-masing dirumuskan dengan jelas dalam dokumen resmi organisasi dan menjadi arah perjuangan yang terukur.
 - a. Tujuan jangka pendek yang diusung SI telah tertuang secara eksplisit dalam Anggaran Dasar organisasi. Tujuan ini antara lain mendorong terbentuknya kerja sama dan rasa saling tolong di antara anggota, memperkuat jaringan ekonomi umat melalui pengembangan usaha halal, serta mendorong interaksi sosial yang menjunjung nilai-nilai persaudaraan Islam. Selain itu, organisasi juga mendukung setiap bentuk usaha yang sah menurut hukum yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan ini menitikberatkan pada penguatan ekonomi dan penghidupan umat yang bermartabat, dengan prinsip bahwa seluruh anggota hendaknya memperlakukan satu sama lain seperti saudara, saling menolong dan bekerja demi kesejahteraan bersama, dengan tetap taat pada hukum yang berlaku.
 - b. Tujuan jangka panjang Sarekat Islam mencakup aspirasi besar dalam meningkatkan kesejahteraan lahir-batin serta membangun kesadaran nasional masyarakat pribumi agar siap menghadapi hegemoni kolonialisme Belanda. Organisasi ini juga berkomitmen memperkuat kohesi umat Islam sebagai bagian dari strategi membangun kekuatan politik dan ekonomi bangsa. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan kepada pedagang kecil agar mampu bersaing dengan pengusaha asing, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan rakyat. Dalam visi jangka panjangnya, SI bertekad menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selain itu, SI juga berupaya memperluas proses Islamisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bagi HOS Tjokroaminoto, kemerdekaan merupakan syarat mutlak agar umat Islam dapat hidup bebas, berdaulat atas negerinya sendiri, dan menjalankan ajaran agamanya dengan sempurna. Pandangan ini ditegaskannya dalam tulisan tahun 1931, di mana ia menyatakan bahwa umat Muslim harus merdeka, baik sebagai umat beragama maupun sebagai bangsa yang memiliki hak atas tanah airnya (Ismail Usman, 2017).

Infiltrasi Ideologi dan Perpecahan Internal dalam Tubuh Sarekat Islam

Pemerintah Hindia Belanda sejak awal merasa cemas terhadap potensi Sarekat Islam (SI) sebagai kekuatan politik yang mampu menggerakkan rakyat secara masif. Kekhawatiran ini

bukan tanpa alasan, sebab SI tumbuh dengan cepat dan menggagalkan persatuan yang solid di berbagai wilayah. Setelah gagal menekan gerakan ini dari luar, pemerintah kolonial mulai menerapkan strategi untuk mengacaukan SI dari dalam. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusupkan ideologi baru melalui strategi infiltrasi yang dikenal dengan sebutan "Blok di dalam", yakni memasukkan kader-kader yang telah dibina khusus agar bisa memengaruhi arah perjuangan organisasi dari dalam. Paham revolusioner dan ajaran sosialisme yang dibawa oleh kader-kader infiltrasi tersebut tidak lepas dari pengaruh pendidikan politik radikal yang diberikan oleh H.J.F.M. Sneevliet, pendiri organisasi Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada tahun 1914. ISDV merupakan organisasi sosialis yang muncul di Hindia Belanda dan bertujuan menyebarkan ajaran sosialisme serta memperjuangkan hak-hak kaum buruh di tanah jajahan.

Meskipun gerakan ini beranggotakan kombinasi antara tokoh Belanda dan pribumi, ideologi yang mereka usung kurang mampu menembus kultur lokal karena tidak memiliki basis yang kuat di tengah masyarakat Indonesia. Namun, ide-ide dari ISDV berhasil memengaruhi beberapa pemuda yang sebelumnya merupakan murid-murid dari HOS Tjokroaminoto, di antaranya Tan Malaka, Semaoen, Darsono, dan Alimin. Mereka belajar banyak mengenai strategi organisasi dari Tjokroaminoto, tetapi pada saat yang sama juga menyerap pemikiran revolusioner sosialisme dari kalangan ISDV. Dalam perkembangan berikutnya, tokoh-tokoh ini justru tampil sebagai penggerak utama dalam tubuh Partai Komunis Indonesia (PKI), meskipun mereka pun tidak luput dari konflik internal di dalam PKI itu sendiri karena perbedaan pemikiran dan pendekatan perjuangan. Ketika Sarekat Islam terus berkembang, perbedaan ideologi antara faksi-faksi di dalamnya semakin tajam dan tidak terhindarkan. Perbedaan inilah yang akhirnya memicu pecahnya SI menjadi dua kubu besar. Perpecahan ini menandai babak baru dalam sejarah organisasi, yaitu lahirnya Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, dan Sarekat Islam Merah yang dikomandoi oleh Semaoen.

1. Sarekat Islam Putih Sarekat Islam Putih berpusat di Yogyakarta dan dipimpin oleh tokoh-tokoh moderat seperti HOS Tjokroaminoto, Abdul Muis, dan Haji Agus Salim. Kelompok ini lebih memfokuskan perjuangannya pada aspek keagamaan, penguatan struktur sosial umat Islam, serta upaya membangun solidaritas nasional. Salah satu inisiatif penting dari Haji Agus Salim adalah mengangkat gagasan Pan-Islamisme untuk menyatukan kekuatan umat Islam dunia. SI Putih juga aktif membangun kolaborasi dengan organisasi politik lainnya melalui wadah seperti Pemufakatan Perhimpunan- Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) guna memperluas jejaring perjuangan kebangsaan.
2. Sarekat Islam Merah Berbeda halnya dengan SI Putih, Sarekat Islam Merah memiliki orientasi perjuangan yang lebih radikal. Fokus utama mereka adalah membela kepentingan kaum buruh dan menolak sistem kapitalisme kolonial yang dianggap menindas rakyat kecil. Dalam prosesnya, kelompok ini kerap terlibat dalam konflik, baik dengan pemerintah kolonial maupun dengan SI Putih sendiri. Puncak dari perpecahan ini terjadi pada tahun 1923, ketika SI Merah secara terbuka menunjukkan afiliasi mereka dengan PKI. Hal ini memperjelas arah ideologis mereka yang semakin condong pada komunisme revolusioner. Seiring waktu, SI Merah mulai mengalami tekanan berat dari pihak kolonial, terutama setelah terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1926–1927 yang berujung pada tindakan represif dan penangkapan besar-besaran terhadap aktivis-aktivis gerakan kiri. Akibatnya, kekuatan SI Merah semakin melemah, dan pengaruhnya dalam pergerakan nasional pun kian meredup. Meski demikian, upaya untuk menyebarkan paham komunisme tidak berhenti. Salah satu cara yang ditempuh adalah mendirikan Sekolah SI Semarang setelah kursus politik yang diinisiasi Tan Malaka ditolak oleh Residen Semarang.

Sekolah ini dijadikan sebagai tempat pengkaderan bagi generasi muda agar kelak menjadi penggerak Partai Komunis Indonesia.

Langkah-langkah politis yang diambil oleh tokoh-tokoh SI Merah dalam menyebarkan ideologi komunisme semakin membuat pemerintah kolonial gelisah. Pemerintah Belanda melihat potensi ancaman besar dari tokoh-tokoh ini. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah tegas dengan mengasingkan pemimpin-pemimpin utamanya seperti Semaun, Darsono, dan Tan Malaka ke Uni Soviet pada tahun 1924. Tindakan pengasingan ini menjadi salah satu bentuk represif kolonial terhadap gerakan kiri yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaan Belanda di Indonesia (Retno Winarni dan Ratna Endang Widuatie, 2015).

KESIMPULAN

Sarekat Dagang Islam (SDI) awalnya dibentuk oleh Haji Samanhudi sebagai wadah perjuangan ekonomi yang bertujuan melindungi pedagang pribumi Muslim dari dominasi dan monopoli etnis Tionghoa dalam sistem perdagangan kolonial Belanda. Fokus utama SDI pada fase awal adalah proteksi terhadap kepentingan umat Islam di bidang ekonomi, dengan pendekatan yang bersifat defensif dan cenderung menghindari konfrontasi langsung. Namun, dinamika organisasi mengalami perubahan drastis ketika kepemimpinan diambil alih oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Di tangan Tjokroaminoto, SDI menjelma menjadi Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi massa modern yang tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga aktif mengusung agenda sosial-politik dan anti-kolonialisme. Perkembangan SI sangat pesat, menjadikannya kekuatan politik rakyat yang menonjol dan menjadi momok yang ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena menyadari bahwa Sarekat Islam terlalu kuat untuk dihancurkan melalui cara-cara represif dari luar, pemerintah kolonial mengubah taktiknya dengan menyusupkan ideologi dari dalam. Strategi infiltrasi ini dijalankan melalui organisasi sayap kiri bernama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang diprakarsai oleh H.J.F.M. Sneevliet. ISDV menanamkan paham sosialisme dan perjuangan kelas ke dalam tubuh SI melalui kader-kader muda yang awalnya dibina oleh Tjokroaminoto sendiri, seperti Tan Malaka, Semaon, Darsono, dan Alimin. Ironisnya, pendidikan politik yang diberikan Tjokro kepada mereka justru menjadi pisau bermata dua—melahirkan generasi kritis yang kemudian membawa organisasi ke arah perpecahan. Sarekat Islam akhirnya terbelah menjadi dua faksi besar: SI Putih yang tetap mengusung nilai-nilai religius dan nasionalisme moderat, serta SI Merah yang berpihak pada ideologi revolusioner dan sosialisme radikal. Perpecahan ini mencerminkan lemahnya fondasi pemikiran yang menyatukan organisasi, memperlihatkan adanya jurang antara massa dan elite serta kurangnya kontrol terhadap arus ideologi besar yang masuk. Akibatnya, SI kehilangan arah dan kekuatannya terfragmentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul, A. A., Sianturi, D. F., Tarigan, A. E., Sihotang, M., & Sinaga, R. (2024). Konstruksi rasial masyarakat Indonesia pada masa kolonial. *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 1(2), 730–734.
- Blumberger, J. Th. Petrus. (1931). *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*. HD Tjeenk Willink.
- Istiyar Rini, W. (2024). Nilai-nilai perjuangan Sarekat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia sebagai penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1).
- Karim, R. (1983). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kapitalisme Bumi Putera: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. (2008). Yogyakarta: LKIS.



- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, jalan peristiwa, dan kelanjutannya: Sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia* (H. Basri, Penerj.). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Lathifah, Z., Syamsul Arifin, dkk. (2020). *Gerakan–Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Pres.
- Ma'arif, A. S. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Nusantara, C. (2025). Penguatan Karakter Kreatif Melalui Media Sosial. *Journal of Civic and Character Education*, 1(1), 11-14.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah nasional Indonesia IV* (hlm. 400–424). Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradita, T. (2025). Sikap Patriotisme bagi Warga Negara di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar. *Journal of Civic and Character Education*, 1(1), 18-21.
- Putra, F. A. (2025). Pengaruh Pembelajaran Inquiry Menggunakan Google Form Terhadap Hasil Belajar Siswa. *JPKP: Jurnal Pendidikan Kurikulum dan Pembelajaran*, 1(1), 22-25.
- Salsabila, M. R. (2025). Upaya Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal*, 1(1), 8-14.
- Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Transmedia.
- Simorangkir, M. (2025). Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Dalam Tinjauan Economic Analysis of Law dan Pendekatan Konservasi. *JLC: Justice Legislation and Crime Journal*, 1(1), 1-6.
- Siregar, T. (2025). Pengaruh Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pemberian Motivasi Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. *AMBA: Accounting Management Business and Asset Journal*, 1(1), 10-15.
- Solahudin. (2011). *NII sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Usman, I. (2017). Sarekat Islam (SI) gerakan pembaruan politik Islam. *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 21(1).
- Winarni, R., & Widuatie, R. E. (2015). Konflik politik dalam pergerakan Sarekat Islam 1926. *Jurnal Literasi*, 5(2), Desember 2015.